

GUSDUR

PRESIDEN SANTRI



KOMPAS DATA



GUSDUR
PRESIDEN SANTRI



Dapatkan koleksi lengkap Buku Kompas dengan mengakses klik.kompas.id/buku

GUSDUR

PRESIDEN SANTRI

Copyright © 2020, Litbang Kompas

Diterbitkan dalam edisi digital oleh Penerbit Buku Kompas, 2020
PT Kompas Media Nusantara, Jl. Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270, email: buku@kompas.com

Tim Penyusun: Litbang Kompas/Arief Nurrachman

Desain Grafis: A Novi Rahmawanta/Adilia Ayu

Foto sampul: Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (02/10/1999).

KOMPAS/JB Suratno

vi + 65 (71 hlm.), 16 x 24 cm

ISBN 978-623-241-451-8 (PDF)

KMN 582012236



Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270

Telp. (021) 5347710 ext. 85770-85789

email: buku@kompas.com |

| facebook: Penerbit Buku Kompas |

| twitter @bukuKOMPAS

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf e, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).


ii

PRESIDEN SANTRI



Daftar Isi

Pengantar.....	v
Calon Presiden Alternatif	1
Menerima Tawaran Poros Tengah.....	7
Berawal dari Penolakan Pidato Habibie	15
Terpilih sebagai Presiden Keempat	23
Detik-detik Sebelum Pemilihan Presiden.....	33
Menanti Restu Ulama	45
Perekat Bangsa yang Terkoyak	57



Gus Dur
memenangkan
pilpres
dengan
373 suara,
sedangkan
Megawati
313 suara.



Pengantar

Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Keempat RI terjadi di luar dugaan banyak pihak. Bermula dari mundurnya BJ Habibie (*incumbent*) yang diusung Partai Golkar karena pidato pertanggungjawabannya di tolak MPR.

Praktis calon kuat kala itu tinggal Megawati Soekarno Putri yang disokong PDI Perjuangan dan Gus Dur yang maju sebagai calon alternatif dari Poros Tengah. Pada proses pemilihan presiden di MPR yang penuh dengan kejar-kejaran angka perolehan suara dari keduanya, Gus Dur memenangi pilpres dengan 373 suara, sedangkan Megawati 313 suara.

Terpilihnya Gus Dur menjadi presiden disambut positif sejumlah pihak terutama latar belakangnya sebagai tokoh Islam moderat.



Dirinya dinilai mampu merekatkan bangsa
Indonesia yang kala itu sedang dilanda konflik
horizontal dan disintegrasi bangsa.




Calon Presiden Alternatif

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mencalonkan deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden alternatif.

Munculnya Gus Dur sebagai calon presiden (capres) alternatif dimaksudkan untuk menghindari perpecahan kelompok bangsa yang semakin meruncing, yang seakan-akan terbagi menjadi hanya dua kelompok-kelompok pendukung Megawati dan kelompok Habibie -yang satu sama lain seperti saling berhadapan.

“Harus ada tokoh alternatif, jangan sampai hanya mengelompok pada (kelompok) Megawati atau Habibie saja. Anak-anak bangsa ini tidak

bisa diarah-arahkan seolah-olah tidak ada capres lain,” kata Amien di Jakarta (20/07/1999), usai seminar “Masa Depan Bangsa” yang diadakan Unicef dan LIPI.



Untuk memuluskan jalan Gus Dur ke kursi presiden, maka perlu ada poros tengah menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR 1999. Untuk menindaklanjuti pembentukan poros tengah, pada tanggal 24 Juli 2009 diadakan pertemuan empat pimpinan partai di Kantor DPP PPP.

Di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Amien Rais bertemu Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Umat (PKU) KH Yusuf Hasyim. Pertemuan ini mendiskusikan lebih jauh kekuatan poros tengah, yang pertama kali dilontarkan Ketua DPP PPP Zarkasih Noer.

Dengan asumsi poros tengah beranggotakan seluruh partai di luar PDI Perjuangan dan Golkar, kata Amien, kekuatan poros tengah tidak bisa dianggap enteng. “Sehingga, kalau kita memunculkan calon presiden, itu artinya kita punya alasan yang cukup kuat,” tegasnya.

” Akan tetapi, kata Amien, untuk jabatan yang sangat strategis seperti presiden, kita harus betul-betul bisa menggali calon dengan benar. “Saya agak tersinggung bila bangsa yang besar ini, dalam soal calon presiden hanya terhenti pada dua kutub,” katanya.

Menurut Amien, setiap pimpinan partai sebaiknya tidak menutup kemungkinan mencari calon alternatif di samping Megawati dan Habibie.

“Sebab, jika kita salah pilih, selama lima tahun kita akan kecewa. Jadi, eksplorasi calon

itu harus dilakukan terus-menerus agar kita tidak kecewa,” ujarnya.

Tak asal pilih

Amien kembali menjelaskan, penetapan Gus Dur sebagai calon presiden tidak asal pilih, tetapi dilandasi pertimbangan yang cukup banyak. Di lingkungan dunia internasional, Gus Dur diterima baik oleh Amerika maupun Timur Tengah. Di lingkungan minoritas, Gus Dur dianggap sebagai sahabat. Di kalangan TNI, Gus Dur punya hubungan cukup hangat. Di kalangan santri, baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah, Gus Dur juga diterima.

“Jadi, saya tidak asal sebut nama. Ada alasan yang cukup kuat. Dan yang paling penting, jika Gus Dur terpilih, resistensi warga PDI Perjuangan tidak ter-lalu tinggi,” ujarnya.

Ketika tawaran itu disampaikan kepada Gus Dur, kata Amien, Gus Dur berkata bagaimana kalau nanti di saat menjadi presiden tidak seperti yang diharapkan. “Saya jawab. Presiden pertama kita orang Muhammadiyah dan presiden kedua kita bibit Muhammadiyah. Tetapi, dua-duanya jeblok. Kalaupun Gus Dur jeblok, ya tidak apa-apa,” ujar Amien disambut gelak tawa hadirin.



Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
KOMPAS/Johnny TG

Amien tidak merisaukan kebutaan yang tengah dialami Gus Dur. “Mungkin KH Said Aqiel (Katib ‘Aam PB NU-Red) lebih tahu dari saya. Di Mesir itu ada Menteri Pendidikan yang tidak bisa melihat sama sekali, namanya Menteri Taha. Tetapi, dia sangat disegani oleh masyarakat di sana,” tegas Amien.

“Jika Gus Dur bisa melihat kembali, saya akan mendorongnya lebih keras lagi. Tetapi, saya tidak ingin memaksakan kehendak. Kalaupun nantinya tidak berhasil, saya tetap akan menghormati presiden terpilih asalkan lewat proses yang benar,” tegasnya.

Sumber: *Pertemuan Pimpinan Empat Partai: Kristalisasi Poros Tengah*. KOMPAS, 25 Juli 1999. Penulis: MBA.



Menerima Tawaran Poros Tengah

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Abdurrahman Wahid bersedia dicalonkan oleh Poros Tengah menjadi Presiden RI. Dikatakan, kesediaan itu semata-mata karena alasan agama.

“**M**au,” tegas Abdurrahman, yang akrab dipanggil Gus Dur, ketika ditanya apakah dia mau dicalonkan menjadi presiden oleh Poros Tengah. Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh peserta Sarasehan Poros Tengah di Jakarta (07/08/1999).

Sarasehan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Penegak

Amanat Nasional (BM PAN) juga menghadirkan nara sumber Ketua Umum DPP Partai Umat Islam (PUI) Deliar Noer, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Umat (PKU) KH Jusuf Hasyim, dan Ketua DPP PAN AM Fatwa. Sementara Ketua Umum DPP PAN Amien Rais batal hadir karena menjaga ibunya yang sedang sakit, dan hanya mengirimkan makalah. Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Hartono Mardjono juga hanya mengirimkan makalah.

Poros Tengah yang digagas oleh PAN, PPP, dan partai-partai Islam lainnya serta diharapkan mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)-disampaikan secara terbuka oleh Amien Rais beberapa waktu lalu. Kehadiran Poros Tengah dimaksudkan untuk menetralsir “perseteruan” yang semakin meruncing antara pendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dan BJ Habibie sebagai presiden. Mereka menawarkan alternatif baru, sehingga pilihan tidak hanya berkutat di antara dua kubu saja. Seiring dengan itu, Poros Tengah juga mengunggulkan Gus Dur sebagai calon presiden.

Gus Dur menegaskan, dia bersedia dicalonkan tetapi tidak akan mencalonkan diri. “Kalau saya dipaksa untuk mencalonkan diri, saya tidak akan melakukannya. Tetapi, kalau dicalonkan, saya

akan menerimanya, dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” ujarnya.

” Sikap itu sesuai dengan tradisi Islam, dan sikap yang ditanamkan di Muhammadiyah maupun NU. Dalam tradisi Islam bukan orang yang ingin menduduki sesuatu jabatan yang ditunjuk untuk menempati posisi itu, tetapi mereka yang ditugaskan yang diminta untuk duduk.

“Selama ini ada kerancuan pendapat, yaitu orang yang dicalonkan harus mencalonkan dirinya. Itu teori Barat, bukan ajaran Islam. Sejarah para kalifah menunjukkan bahwa mereka tidak mencalonkan diri, tetapi dicalonkan,” kata Gus Dur.

Sementara itu, AM Fatwa menegaskan pernyataan Amien Rais yang mencalonkan Gus Dur sebagai presiden bukan manuver, tetapi kesungguhan politik PAN yang ingin memberi

kepemimpinan yang baik buat bangsa ini. “Bagi PAN, Habibie no, Megawati juga no. Sebab keduanya tidak representatif mewakili ide reformasi. PAN mencari sumber daya manusia yang baik bagi kepemimpinan bangsa ini. Kebetulan itu ada pada Gus Dur,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan peserta sarasehan, bagaimana dengan pencalonan Amien Rais sebagai presiden yang direkomendasikan oleh Rakernas PAN, Fatwa mengatakan,” PAN memang belum mencabutnya. Tetapi, dari perolehan pemilu Amien Rais dan PAN tahu diri. Kesungguhan politik PAN adalah mendukung dan mengupayakan Gus Dur untuk memegang kepemimpinan nasional.”

Tidak menggolkan


Mengenai dukungannya terhadap pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, Gus Dur menyatakan masih belum berubah. Namun dukungan itu bukan berarti dia akan berjuang untuk menjadikan Megawati sebagai presiden.

“Saya mendukung, tetapi belum tentu menggolkan. Silakan PDI Perjuangan menggolkan itu di Sidang Umum MPR, katanya kan menang pemilu,” tutur Ketua PB NU ini.

Hal yang sama juga harus dilakukan oleh Amien Rais yang secara terbuka mengunggulkan Gus Dur sebagai calon presiden. “Pak Amien dan Poros Tengah harus berusaha di MPR agar gagasannya ini menang di SU MPR. Apa pun hasil SU MPR kita harus menerimanya. Mbak Mega harus menerima, Pak Amien menerima, saya juga menerima,” ungkap Ketua Umum PB NU yang juga deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ditegaskan, semua calon yang kini diunggulkan adalah *legitimate*. Persoalan siapa yang akan terpilih, sepenuhnya menjadi keputusan MPR. “Saya akan terima apa pun hasilnya kalau itu keputusan MPR. Megawati terpilih, saya tunduk. Habibie terpilih, saya tunduk. Soal presiden bukanlah soal pintar atau tidak, tetapi soal siapa yang dipilih,” tutur Gus Dur.

Menanggapi tentang keberadaan Poros Tengah, Gus Dur mengatakan, “Poros Tengah adalah poros gerakan reformasi. Kalau mau jujur, Poros Tengah itu ada untuk menjaga keseimbangan. Pak Amien sendiri bilang pada saya, kehadiran Poros Tengah ini untuk mencegah terjadinya kekerasan.”



Gus Dur mengakui bahwa ada anggapan beberapa pihak bahwa Poros Tengah adalah kelompok Islam. Padahal, bukan sebuah kemutlakan yang bernapaskan Islam harus Poros Tengah.

“Poros Tengah itu bisa bukan dari kelompok Islam. Siapa pun yang membela demokrasi itu artinya Poros Tengah,” katanya.

Sebagai muslim, lanjut Gus Dur, dia akan mendukung setiap perjuangan demokrasi. Sebab, Islam adalah agama yang membawa demokrasi. Selain Tauhid, ajaran Islam adalah *tasamuh* (toleransi), yang menjadi inti dari demokrasi. “Dalam berpolitik harus didasarkan pada ajaran Islam. Itu yang saya jalani. Itu juga yang dilakukan oleh Islam yang ada di Poros Tengah. Yaitu memperjuangkan sesuatu karena alasan keagamaan,” ungkapnya.

Bila alasan keagamaan berhadapan dengan alasan kenegaraan, lanjut Gus Dur, maka harus dipahami bahwa negara hanyalah



Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, KH Abdurrahman Wahid dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais berorasi di Bundaran Hotel Indonesia, di hadapan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, (29/9/1999).

KOMPAS/Johnny TG

alat. Sementara tujuan yang utama adalah melaksanakan ajaran agama. “Agama harus dilihat sebagai kepentingan, bukan sebagai wadah,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Gus Dur, Poros Tengah pada dasarnya adalah poros yang memperjuangkan terlaksananya demokrasi. “Itu diperjuangkan dengan cara mereka, yang lain pun demikian juga berjuang dengan caranya. Memang ada persaingan, tetapi persaingan tidak harus dilakukan dengan bertengkar. Ini inti Poros Tengah, yaitu memilih cara lain dan tidak menginginkan pertengkaran,” katanya.

Sumber: *Gus Dur Bersedia Dicalonkan Jadi Presiden.*
KOMPAS, 08 Agustus 1999. Penulis: ELY.



Berawal dari Penolakan Pidato Habibie

Menyusul penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie, (19/10/1999), suasana politik di Gedung MPR dan Hotel Mulia serta Hotel Hilton, berlangsung semarak. Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung langsung menggelar rapat fraksi yang juga dihadiri 16 pimpinan DPD Golkar.

Sekitar pukul 02.00 dini hari, Akbar Tandjung menuju Jalan Patra Kuningan tempat tinggal Presiden BJ Habibie. Tidak hanya Tandjung yang muncul. Di situ tampak pula Ketua MPR Amien Rais, Ketua DPP Partai Bulan Bintang

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Hamzah Haz, dan Panglima TNI/Menhankam Jenderal TNI Wiranto.

Setelah menunggu agak lama, BJ Habibie baru berbincang dengan tamu-tamunya. Saat itu pula, Habibie menyatakan pengunduran dirinya dari calon presiden mengingat pidato pertanggungjawabannya telah ditolak MPR. Bahkan, saat itu pula Habibie minta Akbar Tandjung bersedia menggantikan posisi Habibie, maju sebagai calon presiden.

Sempat terdengar isu, selain Tandjung, Ketua MPR Amien Rais juga diminta Habibie mencalonkan diri. Amien yang telah mencalonkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai calon presiden Poros Tengah, tidak menjawab tawaran itu. Amien mengatakan, kalau harus maju menjadi calon, dirinya ingin konsultasi lebih dulu dengan Gus Dur.

Menjelang subuh, Fraksi Golkar melakukan rapat fraksi. Sebagian anggota menolak pencalonan Akbar Tandjung, tetapi sebagian yang lain tetap ngotot Tandjung harus maju dengan tujuan untuk mengganjal Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.


Akbar Tandjung terus maju karena mendapat dukungan dari tokoh Golkar seperti Ginandjar Kartasasmita dan Fahmi Idris. Golkar pun akhirnya memasukkan nama Akbar Tandjung. Tetapi sesaat sebelum sidang dimulai, sekitar pukul 08.30, Tandjung meminta Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Marzuki Darusman mencabut pencalonannya.

” Setelah menyatakan mundur, Tandjung melakukan kontak dengan Gus Dur lewat Ketua DPP Golkar Slamet Effendy Yusuf. Tandjung mundur dengan alasan karena pencalonannya tidak didukung seluruh anggota fraksi.

Gus Dur meminta Tandjung menuju kamar 3212, tempat Gus Dur menginap di Hotel Mulia. Saat itu Gus Dur meminta Tandjung untuk mendampinginya sebagai Wakil Presiden. “Itu langsung diucapkan Gus Dur di depan Tandjung. Alasan Gus Dur, Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memberi tanda

positif agar Tandjung bisa mendampingi Gus Dur,” ujar sumber Kompas.

Pertemuan itu berlangsung cukup singkat. Bahkan, Gus Dur bersama Slamet Effendy Yusuf, Hamzah Haz, dan Akbar Tandjung melakukan pertemuan khusus. Usai melakukan pertemuan itu, Tandjung menuju MPR dan mengadakan rapat fraksi. Kepada para anggota fraksi, Tandjung meminta seluruh anggota Golkar mendukung pencalonan Gus Dur.



Usai pelantikan Presiden KH Abdurrahman Wahid, (20/10/1999), bertempat di ruang KK-2, Fraksi Partai Golkar menggelar rapat fraksi. Di situ semua anggota fraksi sepakat mendukung pencalonan Akbar Tandjung sebagai calon wakil presiden.



Ekspresi wajah lepas BJ Habibie meninggalkan Gedung MPR/DPR setelah menyerahkan kursi kepresidenan kepada penggantinya, Abdurrahman Wahid, pada 20 Oktober 1999 malam.

KOMPAS/Fahmy Myala

Ketua DPP Partai Golkar Marwah Daud Ibrahim memberi tahu fraksi bahwa telah beredar dukungan terhadap Jenderal TNI Wiranto untuk dimajukan sebagai calon wakil presiden. Ketika itu, Tandjung memberi penjelasan, Partai Golkar sudah memberi dukungan kepada Jenderal TNI Wiranto. Dukungan itu ditolak karena tidak pernah merasa dihubungi Fraksi Partai Golkar. BJ Habibie pun tidak pernah menerima surat resmi dari Golkar untuk pencalonannya.

Ketika itu, Anton Lesiangi berdiri. Dia memberitahu sidang bahwa Gus Dur meminta bahwa yang menjadi Wakil Presiden adalah Erna Witoelar. Informasi ini diragukan kebenarannya, sehingga Tandjung pun harus kembali menghadap Gus Dur yang sudah berada di Wisma Negara. Ketika menerima Tandjung yang ditemani Ginandjar Kartasasmita, Gus Dur pun masih tetap menginginkan Tandjung menjadi Wakil Presiden. Dari Wisma Negara, Tandjung menuju kediaman BJ Habibie, yang ketika Tandjung tiba, tengah berenang. Kepada Habibie, Tandjung mengatakan bahwa pencalonannya sebagai wakil presiden telah mendapat dukungan fraksi. Habibie mengatakan silakan saja.

Sekitar pukul 10.00, setelah Ketua MPR Amien Rais mengatakan Sidang Paripurna pemilihan Wakil Presiden ditunda, Fraksi Partai Golkar menggelar rapat. Saat itu terjadi tarik-menarik mengingat Wiranto, yang secara resmi diminta Habibie untuk mendampinginya, ternyata mendapat dukungan dari 74 anggota MPR.

” Untuk menyelesaikan masalah ini, Tandjung mengutus tiga orang menemui BJ Habibie. Mereka adalah Abdul Gafur, Afifuddin, dan Marwah Daud. Tandjung menerima telepon untuk segera pergi ke rumah Habibie. Ditemani Fahmi Idris dan Eki Syahrudin, Tandjung berangkat ke Patra Kuningan.

Sesampainya di rumah BJ Habibie, Tandjung diminta menunggu di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Wiranto keluar dan baru kemudian Tandjung masuk. Entah apa yang dibicarakan,

ke luar dari rumah Habibie, Tandjung tiba-tiba mengundurkan diri dari pencalonan wapres. Secara resmi pengunduran diri itu diucapkan Akbar Tandjung pada saat Sidang Paripurna MPR digelar. Dengan alasan persatuan dan keutuhan organisasi, Tandjung mengundurkan diri. Praktis calon wakil presiden tinggal Megawati dan Hamzah Haz.*

Sumber: *Berawal dari Penolakan Pidato Habibie...*
KOMPAS, 01 November 1999. Penulis: Lily Yulianti, Mohammad Bakir.





Terpilih sebagai Presiden Keempat

Setelah hampir tidak terpilih menjadi Utusan Golongan MPR, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden keempat, untuk menggantikan BJ Habibie. Dalam pemilihan yang berlangsung tertutup dan demokratis di Gedung MPR/DPR, Jakarta (20/10/1999) itu, Abdurrahman mengungguli Megawati Soekarnoputri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Dari 691 anggota MPR yang menggunakan hak pilihnya, Gus Dur meraih dukungan 373 suara, sedangkan Megawati 313 suara. Lima suara menyatakan abstain.

Gus Dur adalah calon presiden dari Poros Tengah, yakni gabungan Fraksi Reformasi (F-R), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), dan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB).

” **Kemenangan
Abdurrahman Wahid-yang
didukung pula sebagian anggota
Fraksi Partai Golkar setelah
calon presidennya, BJ Habibie,
mengundurkan diri-langsung
disambut teriakan gembira dan
shalawat badar pendukungnya
yang berada dalam Gedung
MPR maupun di luar gedung.**

Bahkan, sejumlah peninjau dan wartawan yang meliput pemilihan itu langsung menaiki meja di depan ruang sidang. Mereka menari-nari dan bernyanyi bergembira, sambil membentangkan poster yang menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Abdurrahman Wahid.

Di depan ruang sidang, enam aktivis Pijar Indonesia membentangkan spanduk. Tetapi bukan memberikan dukungan kepada Gus Dur, namun berbunyi: “Jika Anti Demokrasi dan HAM, Siapa pun Presidennya Lawan”.

Sesaat setelah penghitungan suara usai dilakukan, Megawati Soekarnoputri melakukan interupsi, meminta agar pimpinan MPR memberinya kesempatan untuk berbicara. Amien Rais memberikan kesempatan itu.

Dalam pernyataannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, Megawati menyatakan, “Dari hasil perhitungan yang ada, saudara saya KH Abdurrahman Wahid mendapatkan angka lebih dari saya. Untuk keutuhan bangsa, saya meminta kepada seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia untuk dapat melihat keadaan ini.”

Yusril mundur

Semula, calon presiden yang berlaga dalam pemilihan itu tiga orang, termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Tetapi sebelum voting dilakukan, Yusril menyatakan mengundurkan diri karena ingin menjaga ukhuwah dengan Gus Dur. Setelah Yusril mengundurkan diri, tinggal

Megawati “berhadapan” dengan sahabatnya, Gus Dur.

Sebelumnya, Fraksi Golkar mengajukan nama Akbar Tandjung sebagai pengganti BJ Habibie yang pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR. Namun sejam kemudian, Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Marzuki Darusman menarik lagi pengajuan Tandjung itu atas perintah Akbar Tandjung. Dalam pleno pagi hari, Tandjung menyatakan tidak bersedia diajukan menjadi calon presiden. Selanjutnya rapat pleno menentukan Golkar memberikan suara untuk Gus Dur.

Sebelum dilakukan pemilihan, puluhan mahasiswa maupun pelajar dari Forum Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Timur (FPMIT) menggelar unjuk rasa di dalam gedung MPR/DPR. Mereka menggelar berbagai poster yang berisikan kekecewaan terhadap F-PG, khususnya kepada Akbar Tandjung, Marzuki Darusman, dan Ginandjar Kartasasmita.

Aparat keamanan dalam gedung MPR tetap membiarkan poster FPMIT berserakan di lantai dasar. Aparat pun membiarkan peninjau yang datang ke ruang sidang dengan membawa poster.

Pidato pertama

Abdurrahman Wahid mengucapkan sumpah sebagai presiden tadi malam. Dalam pidato pertamanya sesuai pengucapan sumpah itu, Presiden menegaskan, hanya yang memahami hakikat demokrasilah yang dapat memelihara dan menegakkan demokrasi. “Demokrasi hanya dapat dipelihara dan dikembangkan orang-orang yang mengerti tentang hakikat demokrasi itu sendiri,” tuturnya.

Oleh karena itu, secara khusus presiden mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, yang telah menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. “Saya mengucapkan terima kasih kepada saudari saya, Megawati Soekarnoputri, yang telah menunjukkan pengertian yang mendalam terhadap keadaan kita semua, di samping juga sanggup melaksanakan kehidupan berdemokrasi bersama-sama dengan saya, sebagaimana terbukti pada jalannya pemilihan presiden,” kata Gus Dur.

Tentang tugas beratnya nanti, Gus Dur menggarisbawahi tentang peningkatan pendapatan rakyat, menegakkan keadilan dan

mendatangkan kemakmuran, mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Tentang hubungan internasional, Gus Dur menegaskan, harus saling menghormati dan menghargai.

Secara khusus, dalam pidatonya Gus Dur menyatakan terima kasih kepada istri dan keluarganya. “Beban yang sangat berat yang hanya mungkin terlaksana karena bantuan istri saya sekeluarga, serta didahului oleh langkah-langkah yang diambil oleh mantan Presiden Habibie dan keluarga,” ungkapnya.

Gus Dur juga meminta agar Majelis senantiasa membimbingnya dalam melaksanakan tugas sebagai Presiden RI. “Saya berharap Majelis membimbing saya sebagai Presiden RI, beserta pembantu-pembantu saya di segenap bidang, sehingga dapat memelihara harga diri dan kedaulatan kita sebagai bangsa,” imbaunya.

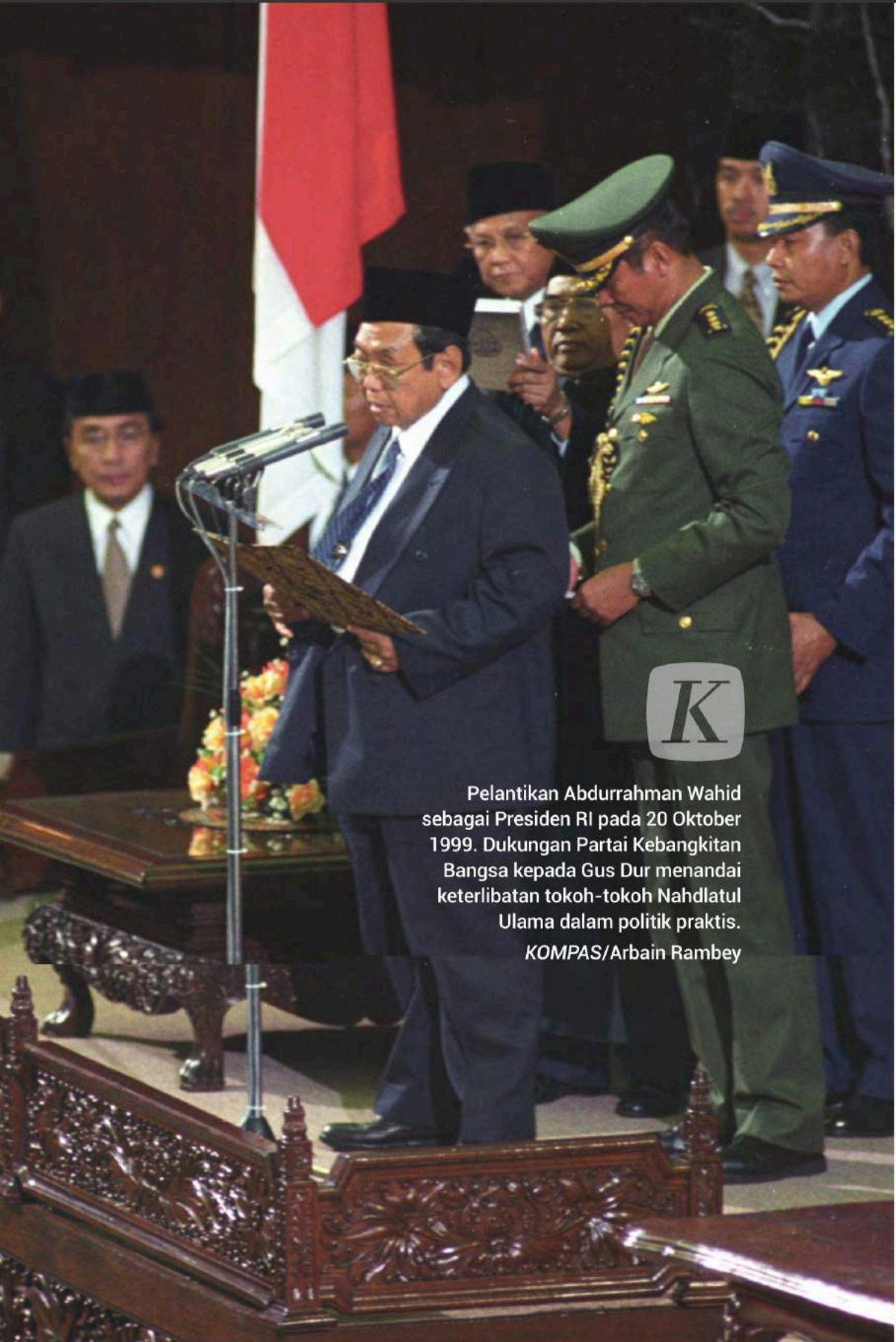
Kunjungan Gus Dur

Setelah terpilih menjadi presiden kemarin sore, Gus Dur langsung mengunjungi Habibie. “Pak Habibie sudah memulai sesuatu yang besar. Orang tentu ada kekurangannya, tetapi kita tidak usah melihat kekurangannyalah,

lihatlah kelebihanannya, itu saja,” kata Gus Dur di teras kediaman Habibie di perumahan Patra. Di samping Gus Dur berdiri Habibie dengan penuh senyum. Sebelumnya, kedua tokoh itu mengadakan pertemuan 40 menit.

Sementara Habibie mengatakan, siapa pun yang menjadi presiden dan wakil presiden harus dibantu bersama agar pembangunan dan proses demokrasi sesuai dengan rencana dan jadwalnya. “Kualitasnya terus ditingkatkan, dan sasarannya adalah sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu ya Gus ya, sudah ya,” kata Habibie.

”
Lalu Gus Dur melanjutkan dengan mengatakan, “Saya dan Pak Habibie akan mendirikan sebuah lembaga untuk mewujudkan cita-cita itu tadi.”

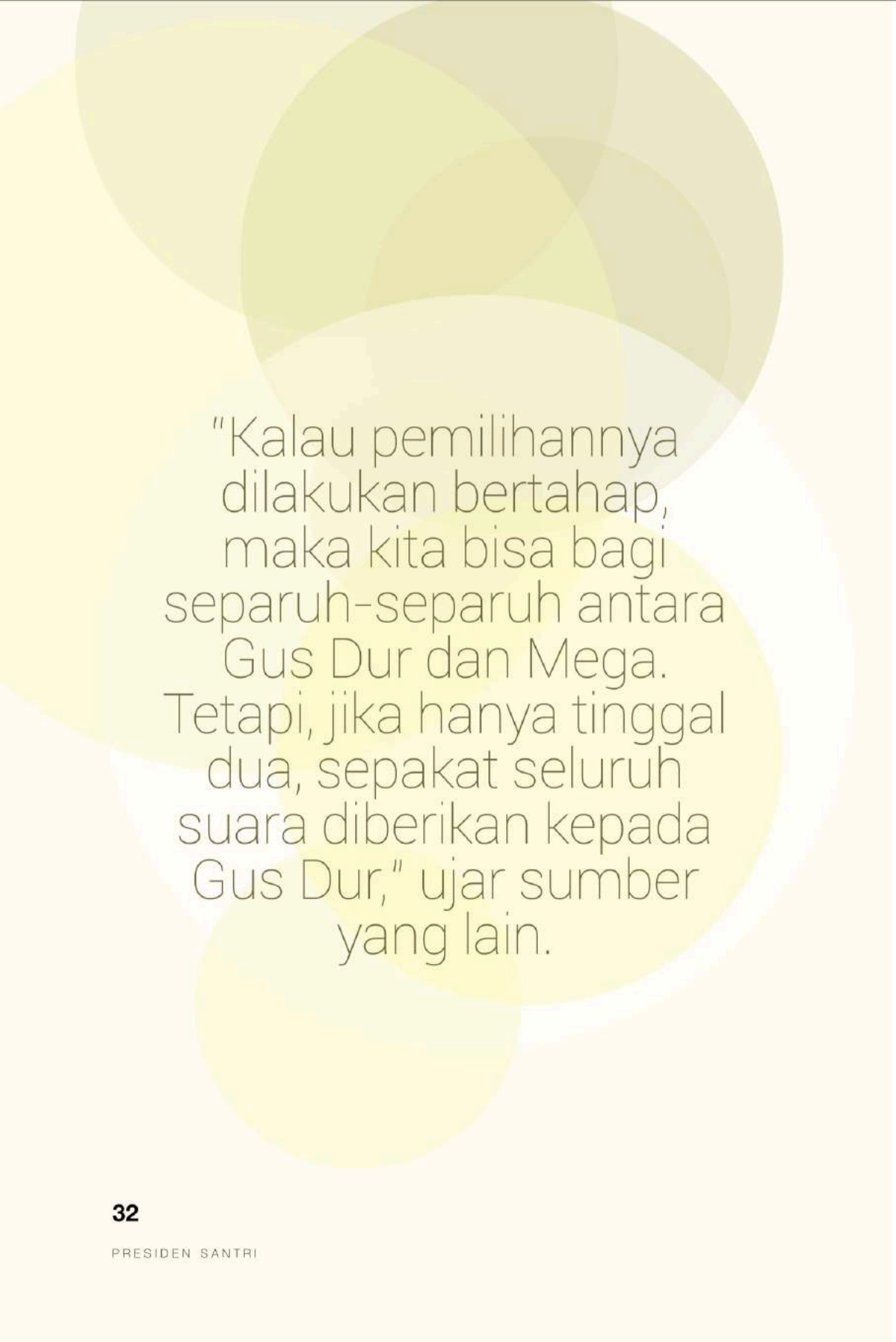


Pelantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 1999. Dukungan Partai Kebangkitan Bangsa kepada Gus Dur menandai keterlibatan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dalam politik praktis.
KOMPAS/Arbain Rambey

Sekitar pukul 17.30, Gus Dur juga mengunjungi Megawati di kediamannya di Jl Kebagusan, Jakarta Selatan. Gus Dur yang datang bersama istri serta sejumlah keluarganya dengan pengawalan ketat Pasukan Pengamanan Presiden. Mereka diterima Mega di ruang tamu. Gus Dur dan Mega terlibat pembicaraan sekitar 10 menit.

Namun usai pertemuan itu saat ditanya wartawan soal apa yang dibicarakan dengan Mega, Presiden Abdurrahman berkomentar pendek, “Saya ‘kan biasa sering ke sini”.

Sumber: *Presiden Harapkan Bimbingan MPR.*
KOMPAS, 21 Oktober 1999. Penulis: OSD, MBA,
GUN, TRA, ELY, MYR, USH, HH.



"Kalau pemilihannya dilakukan bertahap, maka kita bisa bagi separuh-separuh antara Gus Dur dan Mega. Tetapi, jika hanya tinggal dua, sepakat seluruh suara diberikan kepada Gus Dur," ujar sumber yang lain.



Detik-detik Sebelum Pemilihan Presiden

Tidak banyak yang tahu, jika sejak awal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah membuat Rancangan Ketetapan (Rantap) tentang penolakan pertanggungjawaban BJ Habibie. Masyarakat hanya tahu, PKB tegas menolak pidato BJ Habibie, walaupun pidato itu belum dibacakan.

Pembuatan rantap itu didasarkan pada pertimbangan rasional berdasarkan analisis ilmuwan dan pakar politik, serta informasi “Poros Langit”. Jika Habibie maju terus, keadaan

akan makin memburuk, bahkan bisa mengarah pada perang saudara. Sebenarnya, informasi “Poros Langit” menyangkut calon presiden ada tiga. Menyangkut BJ Habibie, para ulama hanya melihat kegelapan. Untuk Megawati rada gelap, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih harus menunggu perkembangan. Hal itu juga didasarkan bahwa kalau Habibie ikut bertarung dan maju terus, baik Gus Dur atau Mega, belum bisa dipastikan meraih kursi presiden.

Di samping itu, soal politik uang yang makin santer dibicarakan membuat keinginan menolak laporan pertanggungjawaban itu makin menguat. Sederhananya, Mega atau Gus Dur akan menguat kalau Habibie berhenti di tengah jalan.

” Menyangkut pencalonan Gus Dur, menurut Sekjen PKB Muhaimin Iskandar, sebenarnya mulai diperdengarkan sejak masa kampanye. Alasannya, PKB takut dianggap hanya mengekor PDI Perjuangan yang punya hubungan sangat dekat.



Syukuran terpilihnya Amien Rais sebagai Ketua MPR (07/10/1999) di Hotel Kempinsky, Jakarta. Turut hadir Yenny Wahid, Gus Dur, Ketua DPR serta Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung, dan Menhankam Wiranto pada acara tersebut.

KOMPAS/Eddy Hasby

Alasan PKB saat itu, kata Muhaimin, jika Gus Dur maju, itu semata didasarkan pada kepentingan dibutuhkannya kepemimpinan yang cukup *legitimate*. Artinya, presiden memiliki basis *grassroot* yang kuat. Tetapi, pada saat itu PKB agak ragu karena Gus Dur masih terbaring di tempat tidur, sakit.

Apalagi, Gus Dur sendiri dengan tegas selalu mengatakan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri. “Keraguan itu makin besar saja,” ujar seorang pengurus PKB.

Dengan alasan itu pada musyawarah pimpinan (Muspim) PKB menilai Gus Dur sulit untuk dijual. Apalagi, dalam hal perolehan suara PKB berada di urutan keempat. Muncul pemikiran untuk memberi dukungan kepada partai pemenang, dengan tujuan agar keadaan bisa segera pulih. “Kita sama sekali tidak pernah konsultasi dengan Gus Dur yang sedang berobat ke Amerika,” ujar Muhaimin.

Secara tidak terduga, sepulang dari AS, Gus Dur dicalonkan Amien Rais, karena Poros Tengah tidak punya tokoh. Gus Dur masih belum merespons sepenuh hati terhadap pencalonan itu.

“PKB sendiri setengah tidak percaya, bahkan bisa dipastikan ragu terhadap keseriusan Poros Tengah itu. Dan keraguan itu makin hari makin bertambah ketika kita minta kepastian Amien Rais, dia pun ragu-ragu,” ujar sebuah sumber.

Suatu hari, tiga tokoh PKB, Muhaimin Iskandar, Alwi Shihab dan KH Yusuf Muhammad datang ke PB NU. Mereka menanyakan niat Gus Dur, ternyata Gus Dur bilang siap maju. “Kalau mau tahu kepastiannya tolong cek Mas Amien. Akhirnya kami minta bertemu Pak Amien. Tetapi, di situ pun kita belum mendapat kepastian yang serius,” ujar sumber Kompas. Di sisi lain, dukungan Gus Dur terhadap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri makin menyusut. Gus Dur ragu terhadap Mega, dengan sejumlah alasan. Di samping itu, Gus Dur ingin mengembangkan demokrasi sehingga kalah atau menang, Gus Dur akan maju terus.

Keberatan Gus Dur itu disampaikan PKB kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR, Ir Sutjipto. Sebagai Ketua Fraksi, Ir Sutjipto berniat menyampaikannya kepada Megawati.

Suasana di SU MPR makin menguatkan posisi Gus Dur, yang tetap menjadi calon alternatif mengingat perseteruan antara kelompok BJ Habibie dan Megawati makin mengeras. Dengan posisi seperti itu, PKB bertekad mendorong terus Gus Dur untuk maju dengan cara meminta Poros Tengah membuat pencalonan resmi.

“Dengan pertimbangan kronologi tadi, kami membuat pencalonan resmi yang oleh Pak Matori dianggap pribadi. Tetapi, perkembangan di lapangan ternyata Gus Dur mendapat respons cukup, khususnya dengan adanya penolakan Kelompok Habibie oleh Mega dan sebaliknya Mega ditolak Habibie,” ujar sumber Kompas.

” Sebelum melakukan pencalonan resmi, lewat Fuad Bawazier, PKB mencek kesungguhan Poros Tengah. Apalagi, hari itu terdengar kabar bahwa Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra membuat pernyataan bahwa Poros Tengah akan mengevaluasi pencalonan Gus Dur.

Artinya, PKB melihat tanda-tanda Poros Tengah tidak bersungguh- sungguh dengan pencalonan Gus Dur.

Akhirnya, Fuad Bawazier mempertemukan Gus Dur dengan Amien Rais, Tosari Wijaya, Yusril dan beberapa pengurus PKB di Hotel Sahid. Pada pertemuan malam itu, dicapai kesepakatan bahwa pencalonan resmi harus segera dilakukan dengan tertulis. Esok harinya, Fraksi Reformasi melakukan jumpa pers dan mengumumkan pencalonan resmi Gus Dur.

Namun, ternyata PPP dan PBB tidak segera melakukan pencalonan tertulis itu. “PKB cukup gelisah. Kita terus berupaya meyakinkan partai-partai lain, bahwa PKB serius mencalonkan Gus Dur,” ujar sumber lain di PKB.

Ketika SU MPR menolak pidato pertanggungjawaban BJ Habibie, malam hari itu juga beberapa tokoh Poros Tengah berkumpul di Hotel Mulia. Hadir antara lain, Amien Rais, Syafi'i Ma'arif, Abdillah Toha, Alwi Shihab, KH Yusuf Muhammad, Muhaimin Iskandar, dan Gus Dur. PKB berpendapat dengan penolakan

pertanggungjawaban BJ Habibie, hitung-hitungan menunjukkan makin menguatnya posisi Gus Dur.

Di tengah-tengah pertemuan berlangsung, Amien Rais diminta datang ke Patra Kuningan, tempat tinggal BJ Habibie. Bersama Syafi'i Ma'arif, Amein Rais berangkat menemui sejumlah tokoh Golkar yang telah berkumpul di sana.

Sepulang dari Patra, Amien menceritakan, baik Golkar versi Habibie ataupun Akbar Tandjung sepakat mencalonkan Amien Rais maju ke pencalonan presiden. Tetapi, Amien tidak bilang ya atau tidak. Amien hanya bilang sebelum menyatakan menerima atau menolak, dirinya harus bertemu dengan Gus Dur.

Di sisi lain Amien mengatakan, jika Gus Dur tetap maju tanpa mendapat dukungan dari Golkar, itu cukup berat. Syafi'i Ma'arif pun lalu bertanya kepada PKB, bagaimana jika kondisinya seperti itu. "Kami menjawab, bagi PKB selama Gus Dur tidak nomor satu, kami tidak akan mau bergabung dan bahkan tidak bisa menjamin untuk mendukung Poros Tengah," ujar sumber itu.

Beberapa pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), juga meminta tolong kepada PKB untuk memuluskan jalan Amien Rais.

” Dari pertemuan itu sempat muncul alternatif formulasi Gus Dur sebagai presiden dan Amien Rais sebagai wakil presiden. PKB menolak, dan kemudian keluar dari pertemuan itu untuk melaporkan kepada Gus Dur. “Ya sudah, kita maju terus. Apa pun yang terjadi kita maju,” tegas Gus Dur.

Sekitar pukul 07.00, F-KB secara resmi memajukan KH Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden ke Sekretariat Jenderal MPR. “Saat itu, tidak satu pun fraksi yang mengajukan Gus Dur, kecuali PKB. Jadi, kami yang paling awal memasukkan nama Gus Dur ke MPR,” ujar Ali Masykur Musa, anggota F-KB DPR/MPR.

Usai memasukkan nama Gus Dur, PKB mengutus Alwi Shihab menemui Gus Dur.

Ternyata di sana ada Akbar Tandjung dan kawan-kawan bertemu dan menyatakan dukungan kepada Gus Dur. Makin mengejutkan lagi ketika calonnya ternyata cuma tiga, dan calon dari Fraksi Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra mundur sebelum voting dilakukan.

Akan tetapi, keraguan sempat menghantui F-KB pada detik-detik terakhir akan masuk ruang sidang. Rapat fraksi belum mencapai kata sepakat, apakah mendukung sepenuhnya Gus Dur atau tidak, jika ternyata calonnya lebih dari dua, selain Gus Dur dan Megawati.

“Kalau pemilihannya dilakukan bertahap, maka kita bisa bagi separuh-separuh antara Gus Dur dan Mega. Tetapi, jika hanya tinggal dua, sepakat seluruh suara diberikan kepada Gus Dur,” ujar sumber yang lain.

“Setelah pemungutan suara dan Gus Dur menang, saya langsung buat pernyataan. Melihat kondisi rakyat dan PDI tidak punya posisi apa pun, Mbak Mega harus maju menjadi calon wakil presiden. Semalam suntuk saya mendapat telepon dari sana-sini. Saya tidak tahu bahwa Mega sendiri masih maju-mundur, tetapi kita bertekad Mega harus maju terus,” ujar Muhaimin.

Sampai sekitar pukul 03.00 pagi, syarat kelengkapan Mbak Mega masih belum diterima PKB. “Kami minta bantuan Mas Syaifullah Yusuf (warga NU anggota DPR/MPR PDI Perjuangan-Red), untuk segera melengkapinya. Pagi harinya, Mas Arifin Junaidi kami minta bantuan menyerahkan ke MPR,” ujar sumber itu.

Ketika hendak memasuki ruang sidang, PKB dapat kepastian bahwa Akbar Tandjung dan Wiranto mundur. Sebelumnya, PKB mendengar kabar bahwa Akbar Tandjung mau mundur, tetapi Fraksi Partai Golkar (F-PG) menolak. Sebaliknya, PPP maju terus bersama Poros Tengah, bahkan minta dukungan PKB.

“PKB hanya bisa bilang, kami yang mencalonkan Mega masak kami harus berkhianat. Sempat terjadi debat hangat tentang masalah ini dengan PPP,” ujar sumber.

Sebagai solusi, PPP minta dua wakil presiden tentu dengan amandemen UUD ‘45. PKB melihat hal itu tidak rasional. Apalagi, opsi dua wakil presiden pada rapat pimpinan fraksi dan pimpinan MPR, sudah ditolak.

Melihat gelagat kemungkinan alotnya pemungutan suara, Ketua MPR Amien Rais menskors sidang. Begitu diskors, PKB berusaha

meyakinkan Ketua DPP Partai Golkar, Slamet Effendy Yusuf. “PKB menugaskan Sekjen untuk menemui Presiden di Istana melaporkan situasi, dan Slamet bersedia mendukung Mbak Mega jika memang diminta Gus Dur,” ujar sumber di PKB.

Gus Dur mengiyakan, dan Slamet kemudian meneruskan itu kepada Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. Tetapi PPP tetap mau bertarung sampai pemungutan suara dilakukan. “Bagi Hamzah Haz, tidak ada pilihan lain kecuali maju, menang atau kalah. Tetapi, sebagian teman saya di PPP bilang kalau Hamzah maju terus, dia akan kalah,” ujar orang PKB.

Siapa sebetulnya yang meminta Akbar Tandjung dan Wiranto mundur, masih belum pasti. “Yang jelas, Gus Dur mengutus Alwi Shihab dan KH Yusuf Muhammad menemui Wiranto,” ujar sumber tersebut.*

Sumber: *Detik-detik Sebelum Pemilihan Presiden.*

KOMPAS, 01 November 1999. Penulis: -



Menanti Restu Ulama

Meski belum jelas benar siapa yang pertama kali melontarkan pencalonan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tetapi nama Gus Dur terus makin mencuat karena mendapat dukungan penuh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Di berbagai kesempatan, Amien Rais melontarkan gagasan tentang pentingnya calon presiden alternatif mengingat makin mengerasnya pertentangan antara kelompok pendukung Megawati Soekarnoputri dan Presiden BJ Habibie.

Amien selalu mengatakan, Gus Dur merupakan pilihan paling tepat mengingat tingkat resistensinya sangat kecil, baik dari kelompok pendukung Habibie maupun Megawati. Artinya, Gus Dur diterima oleh semua kelompok di Indonesia.

Amien benar. Tetapi kebenaran itu tidak serta merta membuat para ulama NU percaya begitu saja akan pencalonan itu. Sejarah membuktikan antara NU dan Masyumi terjadi ketidakserasian, kalau tidak mau dibilang persaingan tidak sehat. Ketidakpercayaan itu membuat ulama menggelar pertemuan khusus hanya untuk membahas soal pencalonan itu.

Gus Dur pun tidak serta merta percaya akan gagasan Amien. Gus Dur kemudian membawa Amien Rais dan kawan-kawannya dari Poros Tengah keliling pesantren. Dengan cara ini Gus Dur seolah ingin memberi tahu ulama bahwa dirinya tidak bisa bertindak sendiri untuk menanggapi pencalonan itu. Yang lebih penting lagi, Gus Dur menginginkan ulama terlibat dan mengetahui langsung pencalonan itu dari sumber pertama.

Dari sudut ulama, kedatangan Gus Dur bersama Poros Tengah ke pesantren, diartikan

sebagai pemberitahuan akan beratnya masalah yang dihadapi. “Gus Dur ingin ulama mengamati pencalonan dirinya,” ujar KH Hasyim Muzadi, Ketua PW NU Jatim.

Menyangkut pencalonan Gus Dur, para ulama mengamati empat hal yang langsung dikomunikasikan dengan “Poros Langit” (para kiai yang terus menerus memohon petunjuk kepada Allah SWT). Pertama, apakah Gus Dur betul-betul mengharap dan menginginkan dirinya dicalonkan. Kedua, apakah Poros Tengah benar-benar serius dengan pencalonan Gus Dur. Ketiga, jika Gus Dur harus maju para ulama ingin melihat situasi dan kondisi Sidang Umum (SU) MPR. Dan keempat, situasi dan kondisi umat menjelang dan pada saat SU MPR.

Gus Dur pertama kali mengajak Presiden Partai Keadilan (PK) Nurmahmudi Ismail dan Fuad Bawazier mengunjungi Pondok Pesantren Langitan (Tuban). Mereka disambut belasan ulama khas (terpilih) antara lain KH Abdullah Faqih (tuan rumah), KH Abdullah Abbas (Buntet, Cirebon), KH Muchit Muzadi (Jember),

KH Dimiyati Rois (Kendal), KH Warist Ilyas (Sumenep), KH Imron Hamzah (Sidoarjo), dan KH Mustofa Bisri (Rembang).

Usai mendengar penjelasan tamunya, tuan rumah KH Abdullah Faqih tidak langsung memberi dukungan atau penolakan. “Kami memahami apa yang diinginkan Poros Tengah. Tetapi, kami tidak tahu apa yang harus diperbuat,” ujar Kiai Abdullah.

” Sejak itu, para ulama ini terus menggelar pertemuan dengan fokus keempat soal di atas. Komunikasi dengan “Langit” dilakukan oleh semua ulama, tetapi dari belasan ulama itu tiga yang menjadi penentu, KH Abdullah Faqih, KH Abdullah Abbas, dan KH Dahnan (Trenggalek).

Di tengah kebingungan itu, Poros Tengah terus melontarkan pernyataan mendukung pencalonan Gus Dur. Akhirnya, pertemuan

kedua digelar di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Ketua Umum PAN Amien Rais bersama Fuad Bawazier dan Gus Dur, berkunjung ke pertemuan ulama di Buntet.

Sampai akhir pertemuan, para ulama tetap belum yakin akan pencalonan Gus Dur oleh Poros Tengah. “Karena belum yakin, kami minta Amien Rais melakukan upaya agar pencalonan Gus Dur dilakukan resmi oleh masing-masing partai kelompok Poros Tengah. Kalau itu tidak dilakukan, kami belum yakin akan pencalonan Gus Dur,” ujar KH Yusuf Muhammad, yang pada SU MPR ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) MPR.

Untuk meyakinkan diri, mereka mengutus beberapa ulama bertemu Gus Dur. Mereka bertanya apakah kalau dia maju bisa dijamin akan terpilih? Kalau tidak terpilih, apa manfaat yang bisa diperoleh dari pencalonan ini? Berapa suara yang mungkin didapat dan berapa suara yang bisa disumbang oleh Poros Tengah?

Mendengar pertanyaan itu, Gus Dur tidak bisa menjelaskan secara pasti. “Dia hanya bilang, pokoknya saya akan terus maju. Dan, kalau saya maju, Insya allah saya akan terpilih,” kata KH Muchit mengutip jawaban Gus Dur.

Pada acara syukuran atas keberhasilan operasi mata di Amerika Serikat, KH Abdullah Faqih yang diminta menyampaikan doa penutup, tiba-tiba mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, “Janganlah engkau meminta jabatan. Jika jabatan itu diperoleh maka yang akan didapat bukanlah ketenteraman melainkan mudarat. Tetapi, jika jabatan itu datang tanpa engkau usahakan, maka hal itu akan memberi manfaat kepada semuanya”.

” **Meski sudah dicalonkan, Gus Dur pun tidak melakukan upaya-upaya khusus yang mengarah agar dirinya terpilih menjadi Presiden. Bahkan, dia secara pribadi tetap mendukung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.**

Sumber Kompas mengatakan, hasil shalat *istiharah* (konsultasi) juga positif. Gus Dur maju sebagai calon bukan karena ambisi pribadi tetapi

niat tulus ingin menyelesaikan persoalan bangsa. “Ini ‘kan sesuai dengan kenyataan lahiriah yang kita lihat bersama,” ujar ulama asal Rembang ini.

Tentang Poros Tengah, para ulama masih ragu akan kesungguhan niatnya mencalonkan Gus Dur. Sebagian besar ulama, dalam shalatnya dihadapkan pada ayat Al Quran, *wa makaruu wamakarallah. Wallahu khairul maakirin* (Manusia punya rencana, Tuhan juga punya rencana. Tetapi, rencana Allah yang lebih baik).

Dengan ayat ini, para ulama tetap melihat Poros Tengah tidak bersungguh-sungguh. Sehingga, sampai detik-detik akhir pemilihan presiden pun, para ulama sama sekali tidak pernah menyinggung soal Poros Tengah.

Tentang soal SU MPR, para ulama melihat jika Habibie terpilih kemungkinan terjadi perang saudara cukup besar. Sehingga, hal ini akan berdampak langsung pada kemaslahatan umat. “Artinya, situasi pada SU MPR pun membuat ulama secara tidak langsung memberi restu pada pencalonan Gus Dur,” ujar sumber tersebut.



Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

KOMPAS/Johnny TG

Menjelang SU MPR dimulai, para ulama terus melakukan pertemuan untuk melihat hasil istiharah (konsultasi) masing-masing ulama. Meski belum ada kesepakatan, tanda-tanda bahwa pencalonan Gus Dur akan segera mendapat restu mulai terkuak.

” Gus Dur sendiri terus mendesak agar ulama segera memberi keputusan akhir. Bahkan, ketika SU MPR sudah berlangsung beberapa hari, Gus Dur mengatakan, “Dengan atau tanpa restu ulama, saya akan terus maju. Saya lebih cinta demokrasi dibanding kecintaan saya akan semua.”

Mendengar ungkapan Gus Dur yang bernada mengabaikan ulama yang selama ini menjadi panutan NU itu, para ulama kembali menggelar pertemuan. Tiga hari menjelang pemilihan presiden, para ulama NU menggelar pertemuan

bertempat di Hotel Acacia, Jakarta, yang diikuti sekitar 30 ulama.

KH Abdullah Faqih dan KH Dahnan tidak bisa ikut pertemuan, sedang KH Abdullah Abbas yang hadir di situ tidak bisa memberi kata akhir. Ternyata saat itu juga KH Abdullah Faqih mengutus KH Hasyim Muzadi, Ketua PW NU Jatim, untuk menemui Gus Dur.

Menurut sumber Kompas, ketika KH Hasyim sampai di Kantor PB NU, Gus Dur sedang duduk di kamar kerja. Belum sempat KH Hasyim berbincang dengan Gus Dur, muncul Ketua DPP PKB, Alwi Shihab dan dua orang pengurus PB NU masuk kamar kerja Gus Dur.

Dengan berbisik, KH Hasyim mengutarakan kepada Gus Dur ada titipan pesan dari KH Abdullah Faqih. Mendengar bisikan KH Hasyim, Gus Dur meminta semua orang keluar kamarnya. Mungkin, karena ingin tahu pesan KH Abdullah, Alwi malas keluar. Gus Dur sendiri akhirnya minta Alwi keluar.

Kepada Gus Dur, KH Hasyim menyampaikan pesan KH Abdullah Faqih. Kepada Gus Dur, KH Abdullah berpesan, jika harus maju, ulama akan mendoakan pencalonan Gus Dur. Kedua, Gus Dur harus menjaga keutuhan di PKB, yang saat

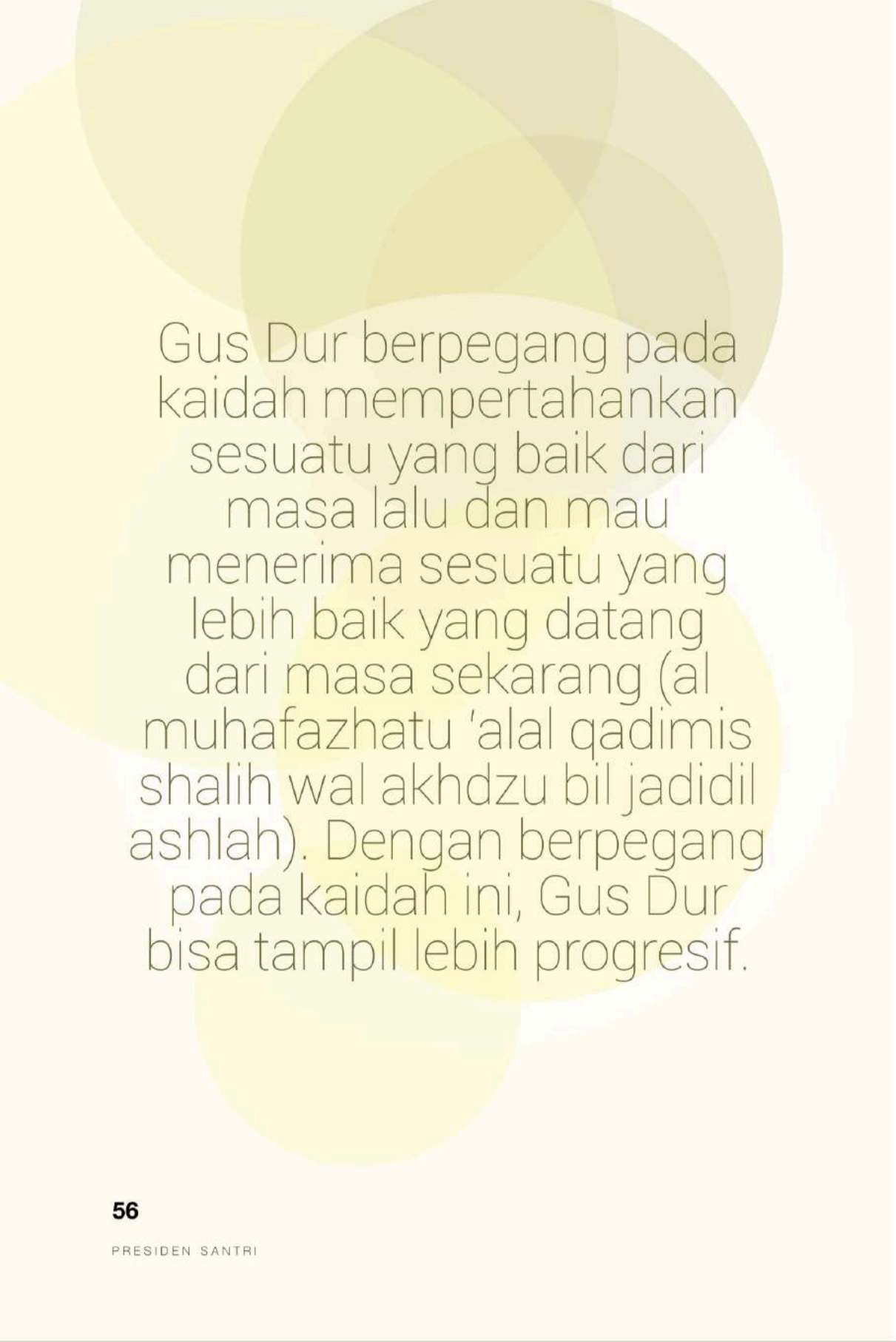
itu sudah terjadi keretakan-keretakan hubungan di antara para pengurusnya. Ketiga, menjaga hubungan baik warga NU dan PDI Perjuangan.

Mendengar ketiga pesan itu, Gus Dur langsung memeluk KH Hasyim sambil menangis. Dengan isak tangis, Gus Dur berkata, “Sampaikan salam hormat saya kepada kiai. Katakan, bahwa Abdurrahman tetap santri. Sampai kapan pun Abdurrahman tetap santri yang tidak mungkin menentang para ulama”.

Usai pertemuan singkat itu, Gus Dur memanggil Alwi Shihab dan meminta segera menggelar konferensi pers.

Ketegangan antara Gus Dur dan para ulama yang sempat terendus masyarakat, akhirnya punah dengan restu dari KH Abdullah Faqih. Apalagi, Gus Dur secara gamblang menyatakan restu itu makin memperkuat dirinya untuk maju sebagai calon presiden. Dan, kalau sampai akhirnya terpilih, jalannya pun ternyata berliku-liku.

Sumber: *Ketika Poros Langit Pegang Kendali*.
KOMPAS, 01 November 1999. Penulis: -



Gus Dur berpegang pada kaidah mempertahankan sesuatu yang baik dari masa lalu dan mau menerima sesuatu yang lebih baik yang datang dari masa sekarang (al muhafazhathu 'alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah). Dengan berpegang pada kaidah ini, Gus Dur bisa tampil lebih progresif.



Perekat Bangsa yang Terkoyak

Di sebuah seminar, ada peserta yang mempersoalkan gelar dan intelektualitas KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat kuliah di Universitas Al Azhar (Mesir) ternyata gagal. Bahkan, ketika pindah sekolah ke Universitas Baghdad (Irak), juga tidak jelas apakah Gus Dur bisa meraih gelar atau tidak. Apalagi, pada pertengahan tahun 1980-an itu, Gus Dur sering menulis di berbagai jurnal ilmiah dan surat kabar dengan tetap menyebut pernah kuliah di kedua universitas tersebut.

Ditanya soal itu, Gus Dur seperti tak peduli. Dia seolah tak lagi mementingkan gelar dan embel-embel lain di belakang namanya. “Yang dipentingkan itu kualitas, bukan sederet gelar yang ada di belakang nama,” tegas Gus Dur.

” **Meski tak pernah memakai gelar, intelektualitas Gus Dur diakui tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri.**

“Ketika kami masih muda, di benak kami beliau ilmuwan kelas dunia yang penuh humor. Pernah bersama Fachry Ali, kami mendengarkan lelucon Gus Dur sampai menjelang pagi hari. Itu tidak ada habisnya,” ujar Dr Hermawan Sulistiyo, pengamat politik dari LIPI.

Predikat yang diberikan Hermawan, bukan hanya isapan jempol belaka. Gus Dur membuktikan itu dengan karya nyata lewat ratusan artikel yang terbit di dalam maupun di luar negeri. Bahkan, upaya pemberdayaan Gus Dur dengan langsung terjun ke pesantren membawa perubahan cukup mendasar pada pola pengajaran di pesantren.

Riwayat pendidikan Gus Dur memang memungkinkan pencapaian itu. Lepas Sekolah Rakyat (SR), Gus Dur masuk sekolah menengah ekonomi (SMEP) di Yogyakarta. KH Wahid Hasyim (ayahnya) menempatkan Gus Dur di rumah tokoh pergerakan Muhammadiyah. Gus Dur sempat menjadi santri di Pesantren Tegalrejo (Magelang), Di sini Gus Dur mulai melahap buku klasik sastra maupun ilmu pengetahuan seperti Das Kapital karya Karl Marx.

Gus Dur pun pindah ke Pesantren Tambakberas (Jombang). Dari Jombang ini, Gus Dur membuka jalan melangkah ke Universitas Al Azhar di Mesir mengingat Pesantren Tambakberas merupakan salah satu dari beberapa pesantren yang diakui oleh Universitas Al Azhar.

Gus Dur yang masuk sebagai mahasiswa Department of Higher Islamic and Arabic Studies Universitas Al Azhar, gagal menyelesaikan kuliahnya. Di saat itu, dia meminta KH Bisri Syamsuri meminang Siti Nuriah. “Saya harus memberi semangat kepada dia. Masak sekolah sudah gagal, asmara pun harus gagal,” ujar Nuriah.



Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam acara peluncuran buku "Gus Dur. Siapa sih Sampeyan? Tafsir Teoritis atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur" karangan Al-Zastrouw Ng, yang diterbitkan oleh Penerbit Erlangga di Jakarta (13/10/1999).

KOMPAS/Johnny TG

Kembali dari Irak, Gus Dur membantu mengajar di pesantren kedua kakeknya di Jombang, Denanyar dan Tebuireng. Gus Dur sempat mengajar di Fakultas Ushuluddin, Universitas Hasyim Asy'ari dan sekolah menengah di pesantren tersebut.

” Di samping aktif mengajar, Gus Dur melakukan upaya pemberdayaan pesantren. Dia mengunjungi hampir semua pesantren yang ada di Jatim dan Jateng. Upaya pemberdayaan itu baru mendapatkan langkah nyata pada pertengahan 1970-an. Bekerja sama dengan LP3ES, Gus Dur terus memberi warna baru bagi pesantren di Indonesia.

Penghargaan Kalpataru bisa menjadi salah satu keberhasilan upaya Gus Dur dalam upaya pemberdayaan itu, paling tidak pesantren intensif terlibat dalam upaya kesehatan pelestarian lingkungan. Cara kerja seperti ini,

memberikan ruang gerak yang cukup bagi Gus Dur untuk tetap memiliki akar pijakan yang jelas pada setiap langkah politiknya di masa depan.

Tegasnya, antara Gus Dur dan para pimpinan serta pengasuh pesantren telah ada kesamaan bahasa yang cukup mendalam. Sehingga, hampir tak ada suatu gerakan Gus Dur yang dianggap mengkhianati pesantren, meskipun tampak luarnya bertentangan dengan tradisi pesantren.

Contoh aktual ketika Gus Dur menerjemahkan ucapan salam dengan selamat pagi. Bagi para ulama pesantren, keinginan itu tidak diterjemahkan dalam kerangka keberagamaan, tetapi semata dalam kerangka budaya di mana Gus Dur menjadi salah satu pelaku. Tetapi, tanggapan keras muncul dari ulama non-pesantren yang menganggap Gus Dur main-main.

“Kalau Gus Dur bicara, kami mengerti siapa yang dituju dari pembicaraan itu. Apakah itu orang politik, jamaah NU atau para elite. Kami sudah tahu Gus Dur sedang berada di frekuensi apa ketika dia bicara,” ujar KH Munasir, ulama sepuh asal Mojokerto.

KH Munasir tidak bercanda. Ketika Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi (Fordem),

sebagian ulama menganggap Gus Dur menyalahi prinsip keulamaan dengan terlibat terlalu intens pada persoalan yang tidak langsung menyangkut masalah umat. Tetapi, tidak kurang pula ulama yang mendukung Gus Dur.

” Segala langkah Gus Dur yang dianggap kontroversial selalu saja mendapat pembelaan dari kalangan ulama. Atau paling tidak, ulama tidak akan bersikap netral. Inilah hasil penting upaya pemberdayaan yang langsung dilakukan Gus Dur di awal tahun 1970-an itu di samping tentu saja ‘darah biru’ yang melekat pada dirinya.

Bahkan, ketika di akhir tahun 1980-an, Gus Dur terlibat silang sengketa dengan KH As’ad Syamsul Arifin, dari Pesantren Asembagus, Situbondo, hingga KH As’ad menyatakan firoq (cerai) dengan Gus Dur. Padahal, perbedaan itu didasari pada perbedaan ushul fiqh yang dianut masing-masing.

Gus Dur berpegang pada kaidah mempertahankan sesuatu yang baik dari masa lalu dan mau menerima sesuatu yang lebih baik yang datang dari masa sekarang (al muhafazhathu ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah). Dengan berpegang pada kaidah ini, Gus Dur bisa tampil lebih progresif.

Sedangkan KH As’ad berpegang pada kaidah ushul idza ta’aradha al muqtadi wal maanik, qudimal maanik (menghindari sesuatu yang jelek lebih utama dibanding mengamalkan sesuatu yang baik). Dengan kaidah ini para ulama sepuh dalam geraknya terlihat lebih konservatif.

Gerakan Gus Dur yang progresif itu sering kali kontroversial dan sulit dimengerti kebanyakan orang. Meskipun sebenarnya jika kita bisa mengikuti arah pemikiran yang melatari gerakan itu. Kontroversi ini juga terlihat ketika Gus Dur terus maju menjadi calon presiden hingga akhirnya terpilih pada SU MPR 1999.

“Gus Dur diperlukan sebagai perekat bangsa yang lagi terkoyak. Sehingga, meskipun negara berada dalam krisis yang cukup mendalam, kami warga NU merelakan Gus Dur,” ujar KH Ma’ruf Amin, mantan Rais Syuriah yang sekarang

menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Gus Dur yang sudah sejak 1984 sampai sekarang, berjanji akan melepas jabatannya pada Muktamar Nahdlatul Ulama di Kediri, 20-28 November 1999. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Presiden dirangkap oleh Ketua PB NU.

Sumber: *Dari Ciganjur ke Istana Negara*.
KOMPAS, 21 Oktober 1999. Penulis: Mohammad Bakir.



Dapatkan koleksi lengkap
Buku Kompas dengan mengakses
klik.kompas.id/buku

ISBN 978-623-241-451-8 (PDF)



9 786232 414518

KOMPASDATA

